

ANALISIS PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

Desi Fitriyani Suryana¹⁾ Dara Istia Aisyah²⁾ Kenji Maulana³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi

desi.fitriyani.suryana05@gmail.com daraistiaisyah@gmail.com kenjimaulana555@gmail.com

Abstract

In the context of recovering the Indonesian economy after the pandemic covid 19, Of course, the government must prepare a plan for Indonesia's economic development. The Government of Indonesia has completed the preparation of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020 – 2024 during the pandemic Covid-19 began to spread throughout the world, as set forth in Presidential Regulation No. 18 of 2020 on February 14, 2020. Planning for Indonesia's economic development in the current period refers to the President's Vision and Mission, namely the Realization of an Advanced Indonesia that is Sovereign, Independent, and Has a Personality Based on Mutual Cooperation which is used as the main basis for preparing the 2020–2024 RPJMN, which will be translated hereinafter into the 7 development agendas. This study aims to find out how Indonesia's economic development planning has changed after the Covid-19 pandemic. This type of research is qualitative, with a literature review method or literature review that contains theories relevant to the topic studied.

Keywords: Development Strategy, Economic Development Planning

Abstrak

Dalam rangka pemulihan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid 19, tentunya pemerintah harus menyiapkan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada periode saat ini merujuk pada Visi Misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dijadikan sebagai landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode kajian Pustaka atau *literatur review* yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dikaji.

Kata Kunci: Strategi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Received: 07 Desember 2023

Revised: 15 Desember 2023

Accepted: 20 Desember 2023

PENDAHULUAN

Suatu negara biasanya mempunyai permasalahan dalam mewujudkan bagaimana masyarakat yang ideal. Untuk mencapai masyarakat yang ideal, pemerintah perlu menyiapkan strategi berupa pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan. Pembangunan dalam segi fisik seperti infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah secara tegas ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, yang dalam implementasinya dijabarkan dalam pembangunan nasional yang terencana baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka menengah. (Makmur & Hadi, 2020)

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dijabarkan ke dalam sembilan misi, yang salah satunya adalah untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia. (Bappenas, 2021)

Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004) Menurut Harrold F. Williamson menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana suatu negara dapat

mempergunakan sumber-sumber produksinya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan terus menerus produksi per kapita dari masyarakat yang bersangkutan. (Nur & Nurhayati, 2022) Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang sistematis dan dilakukan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, diharapkan akan mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Tidak semua pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi semua orang. Ada orang yang menganggap bahwa tingkah laku dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi adalah kurang baik dan malahan tidak diinginkan. Mereka ini hanya tetap menghendaki lembaga-lembaga yang statis. Pertama-tama mereka tidak menyukai adanya semangat ekonomis, semangat penghematan. Justru semangat inilah yang sebenarnya merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan ekonomi. (Hasan & Azis, 2018)

Pembangunan ekonomi memiliki dampak bagi suatu masyarakat, baik itu dampak positif berupa manfaat atau negatif berupa kerugian. Setiap perencanaan pembangunan ekonomi akan memberikan manfaat antara lain: tingkat produksi meningkat, adanya berbagai alternatif kemudahan, terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik, meningkatnya akan nilai-nilai kebersamaan, dan tingkat kesejahteraan penduduk meningkat. Selain itu, perencanaan pembangunan ekonomi juga akan menimbulkan kerugian-kerugian antara lain: pencemaran lingkungan, rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya, munculnya ketimpangan di berbagai bidang, meningkatnya kaum urban, meningkatnya pengangguran, dan terjadinya pergeseran

mata pencaharian. Output yang akan dihasilkan dari pembangunan ekonomi adalah perekonomian masyarakat akan bertambah. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbukanya kesempatan untuk mengadakan pilihan bagi masyarakat.

Pada awal 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang berpengaruh sangat besar pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global pada tidak kurang dari 218 negara, termasuk Indonesia. (Pambudi et al., 2020) Dampak pandemi COVID-19 banyak menyasar lini kehidupan masyarakat dunia seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. Aspek kehidupan paling terasa dampaknya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. (Mubin, 2021) Tidak ada keraguan bahwa wabah ini akan memiliki dampak sosial-ekonomi yang serius dan akan bertahan lama di seluruh penjuru dunia. Banyak organisasi internasional dan badan penelitian telah menerbitkan perkiraan mereka tentang kemungkinan dampak sosial-ekonomi dari pandemi ini. (Habibi & Pratama, 2021)

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dilaksanakan dengan 2 pendekatan utama, yaitu dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. (Pambudi et al., 2020) Namun pemerintah harus melakukan perubahan rencana pembangunan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan membahas mengenai analisis perubahan perencanaan pembangunan di Indonesia pasca pandemic Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. (Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, 1995) Jenis penelitian menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian

kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, dilakukan teknik-teknik tertentu, diantaranya yang paling utama adalah *research* yakni pengumpulan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui kepustakaan. (Nawawi, 1991) Menurut Sarwono 2006 penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. (Milyani Sari, 2020)

Untuk memenuhi data seperti yang disinggung diatas maka diperlukan sumber data primer dan skunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber utama.

b. Data skunder

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab serta data-data dari website atau media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan (penelitian) sebagai data pendukung. (Samsul, 2019)

Pengkajian yang dilakukan mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia dari berbagai artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, internet serta referensi-referensi buku. Kajian pustaka ini berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Suardi, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah harus memperhatikan segala aspek yang menyangkut perencanaan dan

pembangunan ekonomi. Baik perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), maupun perencanaan jangka pendek. Maka dari itu, sebelum pemerintah membuat keputusan melakukan perencanaan pembangunan maka harus mengetahui terkait fungsi dan unsur perencanaan pembangunan ekonomi.

Fungsi dan Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Setiap perencanaan pembangunan ekonomi harus mengandung fungsi pokok antara lain: (Kisno, 2021)

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan mengadakan pilihan yang terbaik untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Sedangkan, unsur-unsur perencanaan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: (Kisno, 2021)

1. Kebijakan dasar pembangunan atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka kerja makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
4. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijakan sektoral lainnya berbagai kebijakan tersebut perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
5. Perencanaan investasi pembangunan yang dilakukan adalah secara program sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama rencana-rencana sasaran. dengan penyusunan.
6. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dampak Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Suatu negara meskipun dalam keadaan makmur sekalipun, pembangunan ekonomi masih diperlukan dan ditingkatkan. Bagi negara maju biasanya lebih ditekankan dibidang teknologi, sedangkan negara berkembang umumnya menekankan pada pembangunan secara fisik seperti infrastruktur jalan, gedung dan sebagainya. Bagi suatu negara, pembangunan ekonomi pasti memiliki dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan harus meminimalkan kerugian yang akan diterima karena tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut ini manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi:

Setiap perencanaan pembangunan ekonomi harus akan memberikan manfaat antara lain: (Hasan & Azis, 2018)

- a. Meningkatkan tingkat produksi

Pembangunan merupakan suatu proses kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP). Konsep GDP yaitu sama dengan output atau produksi,

yaitu produksi barang dan jasa. Dengan adanya pembangunan, maka perekonomian akan mengalami perkembangan, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan akan produk barang dan jasa suatu negara.

b. Terdapatnya Alternatif Kemudahan

Ketika outpunya meningkat akan menjadikan masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan-pilihan. Kebebasan ini tentu sangat menguntungkan, karena masyarakat punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Kemudahan dalam membeli barang misalnya atau kemudahan dalam memilih sarana transportasi yang disukainya. Semua itu merupakan suatu alternatif yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat.

c. Terjadi Perubahan Pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang terjadi dalam jangka panjang. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat pembangunan tidak hanya secara fisik tetapi juga akan membawa perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Di bidang sosial akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai pada masyarakat, baik wawasan maupun pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan, cara berpikir yang lebih rasional. Sedangkan perubahan yang terjadi di bidang ekonomi jelas terjadi, yaitu adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di bidang politik, semakin terbukanya pemahaman akan demokrasi dan sistem politik yang lebih adil.

d. Tingkat Kesejahteraan Penduduk yang Ikut Meningkat

Pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berarti pula tingkat produksi tinggi, akan mengakibatkan perekonomian

masyarakat berkembang. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang tadinya tidak bekerja kemudian bekerja yang dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan pendapatan ini maka, kesejahteraan penduduk secara otomatis juga mengalami peningkatan.

Setiap perencanaan pembangunan ekonomi juga akan menimbulkan kerugian-kerugian terhadap antara lain: (Hasan & Azis, 2018)

a. Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya identik dengan pembangunan sektor industri. Pemahaman ini dapat di mengerti, karena bagi negara berkembang untuk dapat menjadi negara maju, maka sektor industri harus dikembangkan. Persepsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan negara Eropa yang notabene adalah negara maju, dengan sektor industri yang berkembang sangat pesat. Pembangunan industri, terkait langsung dengan lingkungan. Negara berkembang yang pada umumnya kaya akan sumberdaya alam, benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor dari luar. Bagi negara berkembang yang penting industri tersebut dapat memberi masukan bagi negara, maka sepanjang hal tersebut dapat dicapai hal lainnya tidak dipikirkan dengan serius, seperti kerugian akibat pencemaran limbah industri. Hilangnya hutan dan sebagainya.

b. Terjadi Kerusakan pada Tataan Nilai-Nilai Sosial Budaya

Pembangunan berarti suatu keterbukaan, keleluasaan dalam menyerap berbagai nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Dengan semakin terbukanya hubungan dengan dunia internasional, maka semakin banyak

nilai-nilai sosial budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Pergeseran ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan sendiri dalam masyarakat sebab, nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari luar negeri belum tentu sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Maka dalam kondisi seperti inilah terjadi benturanbenturan. Sebagai contoh sikap hidup materialis, individualis adalah merupakan gaya hidup bagi masyarakat kapitalis. Bagi mereka gaya hidup seperti itu adalah hal biasa dan wajar-wajar saja, tetapi bagi masyarakat negara sedang berkembang tentu akan menjadi hal yang dianggap tidak wajar dan dianggap tidak sesuai dengan budayanya.

c. Munculnya Ketimpangan Di Berbagai Bidang

Munculnya berbagai ketimpangan ini, tidak terlepas dari keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki, namun demikian hambatan ini sebetulnya bukanlah alasan utama untuk terjadinya ketimpangan. Penentuan skala prioritas dalam pembangunan (akibat dari dana yang terbatas) harus benar-benar dilakukan secara adil dan merata. Seringkali yang terjadi adalah pemilihan prioritas berdasarkan pada adanya kepentingan politik maupun pribadi. Sehingga tidaklah mengeherankan apabila di negara sedang berkembang tumbuh dengan suburnya masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah.

d. Terjadinya Peningkatan Kaum Urban

Model pembangunan yang banyak berfokus di kota jelas akan menimbulkan rasa iri bagi penduduk di pedesaan. Kehidupan yang dianggapnya jauh lebih baik dilihat dari sisi pendapatan akan mendorong

penduduk desa untuk beramairamai pindah ke kota dan mencari pekerjaan di kota. Oleh karena itu tidaklah heran daerah-daerah dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi, sudah dapat dipastikan jumlah penduduk pendatangnya jauh lebih besar daripada penduduk aslinya.

e. Meningkatnya jumlah Pengangguran

Meningkatnya jumlah pengangguran adalah akibat langsung dari jumlah penduduk yang meningkat terus. Selain itu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja juga dapat menimbulkan masalah pengangguran. Pada umumnya di negara sedang berkembang, model pembangunan yang dijalankan lebih diarahkan pada tenaga kerja yang mempunyai skill, yaitu pada sektor industri. Padahal masyarakat di negara berkembang pada umumnya merupakan masyarakat agraris. Ironisnya sektor Pertanian seringkali diabaikan, dan dijauhkan dalam jangkaan pembangunan.

Dampak yang dirasakan Indonesia juga sangat besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dan pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Nasional. Telatnya identifikasi awal penyebaran virus, lemahnya kebijakan potensi pintu masuk wilayah di suatu daerah, telatnya respon sistematis negara dalam penanggulangan penyebaran virus, hingga sedikitnya persediaan alat pengaman diri dan fasilitas kesehatan, merupakan beberapa faktor mengapa penyebaran virus ini menjadi begitu massif di berbagai belahan dunia. (Nur, 2022)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Sebelum Terjadinya Pandemi Covid 19

Pemerintah negara Indonesia dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia telah memprediksi suatu resiko ketidakpastian yang akan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian negara Indonesia. Pada awal 2020 seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh besar pada hampir diseluruh aspek kehidupan manusia. Menurut data International Monetary Fund (IMF) pada bulan Juni 2020 merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tumbuh minus/negatif 4,9 persen (mengalami kontraksi) pada tahun 2020 ini. Angka ini lebih rendah 1,9 persen jika dibandingkan dengan proyeksi saat bulan April Tahun 2020 lalu yang memprediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global berkontraksi sekitar 3 persen. (Perencanaan et al., 2020)

Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dilaksanakan dengan dua pendekatan utama, yaitu dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan pijakan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Keterpaduan sektor pangan dan pertanian, sektor kemaritiman, sektor industri pengolahan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor ekonomi digital. Pada sektor pariwisata, konsep pendekatan ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan luar negeri turun 59,96 persen selama bulan Januari–Juni Tahun 2020 jika dibandingkan

periode bulan yang sama Tahun 2019. (Perencanaan et al., 2020)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Terjadinya Pandemi Covid 19

Dalam rangka pemulihan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid 19, pemerintah telah menyiapkan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah pusat dan daerah telah membuat revisi mengenai rencana program pembangunan ekonomi yang sebelumnya telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. (Perencanaan et al., 2020)

Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada periode saat ini merujuk pada Visi Misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dijadikan sebagai landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, diantaranya: (Perencanaan et al., 2020)

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ada pula tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan Indonesia dalam RPJMN 2020-2024. *Pertama*, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi. Berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema

anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal. Strategi percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal juga akan mengoptimalkan kerangka kebijakan *Major Projects*. (Muhyiddin, 2020)

PENUTUP

Kesimpulan

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dilaksanakan dengan 2 pendekatan utama, yaitu dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan pijakan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Keterpaduan sektor pangan dan pertanian, sektor kemaritiman, sektor industri pengolahan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor ekonomi digital.

Dalam rangka pemulihan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid 19, tentunya pemerintah harus menyiapkan perencanaan pembagunan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Perencanaan pembagunan ekonomi Indonesia pada periode saat ini merujuk pada Visi Misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dijadikan sebagai landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. (Perencanaan et al., 2020).

1. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada periode saat ini merujuk pada Visi Misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dijadikan sebagai landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, diantaranya: (Perencanaan et al., 2020)
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumssbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
3. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
5. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
6. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
8. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid 19 tentunya harus menyiapkan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang efektif serta efisien. Dengan cara merumuskan dan membuat kebijakan yang tepat serta bersinergi dengan pihak yang lainnya baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan optimal jika dilakukan dengan saling bekerja sama satu sama lain antara kedua belah pihak.

REFERENSI

- Bappenas. (2021). *Visi, Misi, Tujuan dan Renstra*. Visi, Misi, Tujuan dan Renstra
- Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 68–80. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL*. CV Nur Lina.
- Makmur, M. T., & Hadi, S. (2020). Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 117–126. <https://mediaperencana.perencanape mbangunan.or.id/index.php/mmp/artic le/view/7>
- Mubin, N. A. (2021). SDG's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 1330–1343.
- Muhyiddin. (2020). *Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. IV(2), 240–252.
- Nur, L., & Nurhayati, N. (2022). Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi ...*, 7(1), 821–829. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3253/1086>
- Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifabri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalan Media Perencanaan*, 1(1), 1–21. <https://mediaperencana.perencanape>

mbangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/1

Perencanaan, K., Nasional, P., Republik, B., Abstraksi, I., Baru, N., Pembangunan, R., Menengah, J., Kunci, K., Journal, T. I., Planning, D., & Iv, V. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252.

<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>

Suardi, W. I. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Issue September).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. In *Peraturan.Bpk.Go.Id* (pp. 1–32).

[http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)